

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu wujud kebudayaan manusia yang selalu tambah dan berkembang, yang kadang-kadang mengalami kenaikan atau penurunan kualitas (Mulyadi, 2004:1). Pendidikan harus menanamkan tata nilai yang kuat dan jelas sebagai landasan pembentukan watak dan perkembangan kehidupan manusia. Pendidikan harus memberikan suatu yang bermakna, baik yang ideal maupun pragmatis sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan harus memberikan arah yang terencana bagi kepentingan bersama peserta didik, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting bagi pembangunan bangsa. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber Daya Manusia yang bermutu adalah produk pendidikan yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.

Seiring dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, maka guru harus bersiap diri dan proaktif

terhadap target visi pendidikan yang telah diprogramkan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wacana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusai serta sarana dalam membangun watak bangsa. (E. Mulyasa, 2002: 4). Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan akan terus berupaya maksimal untuk senantiasa mencetak generasi muda yang unggul dalam rangka memberi kesempatan bagi calon peserta didik guna mengembangkan prestasi akademiknya dan menentukan satuan pendidikan yang diinginkan, untuk menjaring dan memperoleh peserta didik baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik sesuai dengan visi dan misi.

Paradigma baru pendidikan yang bermutu merupakan kebutuhan rakyat banyak. Oleh sebab itu partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan, investasi, evaluasi pendidikan harus semakin ditingkatkan (Samino, 2009: 39). Sekolah merupakan penyelenggaraan pendidikan formal yang dilakukan mendalami proses manajemen yang sistematis dan bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Keberadaan sekolah masih dipercaya oleh masyarakat untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diamankan oleh tujuan pendidikan Nasional. Untuk itulah sekolah mengalami keterlibatan personilnya perlu menata dan membenahi diri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai standar yang ditentukan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah yang berimbas terhadap otonomi persekolahan, tuntutan peningkatan kualitas sekolah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Beberapa alasan mendasar perlunya peningkatan kualitas tersebut adalah: (1) adanya perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, (2) persaingan antar sekolah yang semakin ketat, (3) produk sekolah yang harus memiliki daya saing tinggi, dan (4) cerminan kemajuan masyarakat di suatu daerah.

Upaya peningkatan kualitas sekolah sebagai produk daerah pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, sekolah maupun masyarakat yang terintegrasi dalam sebuah organisasi yaitu komite sekolah. Namun demikian, pihak sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki peran yang paling menentukan.

Sekolah merupakan pihak yang lebih mengetahui seluk beluk kebutuhan sekolah dalam berbagai aspek peningkatan kualitasnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengupayakan agar sekolah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan pelayanan minimal sumber daya manusia, sehingga kekurangan dan kelemahannya dapat diketahui dan peningkatan sekolah menjadi terarah. Dengan proses tersebut diharapkan kualitas sekolah sebagai cerminan produk daerah akan cepat diraih dengan hasil yang optimal, artinya keberadaan produk sekolah perlu menjadi kebanggaan, identitas

dan ujung tombak pembawa pembaharuan (*agent of change*) bagi masyarakat di daerah tersebut.

Untuk itu kebijakan dan program pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan , efisiensi pengelolaan pendidikan, agar secara efektif dapat memacu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Perluasan kesempatan belajar (akses) serta peningkatan pengelolaan manajemen secara efektif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah disadari bahwa setiap daerah akan mempunyai penekanan prioritas kebijakan program pembangunan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah masing-masing.

Memasuki era globalisasi pendidikan di Kabupaten Sragen pada saat ini telah melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sragen yang cerdas, sehat, trampil dan beradab dengan program: mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan, memberdayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, melakukan pemantapan sistem pendidikan berdasar desentralisasi otonomi, mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan penguasaan pengembangan pemanfaatan IPTEK.

Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dicanangkan sejak tahun 1994 dan diharapkan dapat tuntas pada tahun 2008/2009, masih

menghadapi berbagai masalah yang perlu penanganan bersama, diantaranya adalah: (1) jumlah anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan sampai tahun 2010 masih tinggi, (2) angka partisipasi kasar SMP dari dua puluh kecamatan di Kabupaten Sragen masih dibawah 75%, (3) angka putus sekolah SMP masih 2,74% yang dimungkinkan disebabkan karena factor kemiskinan (jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sragen tahun 2009/2010 memcapai 17%, (4) peran Pemda dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun masih rendah, (5) adanya kesenjangan dan budaya kesetaraan gender, (6) sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai. Agar semakin banyak anak usia 13-15 tahun dapat melanjutkan pendidikan di jenjang SMP salah satu upaya adalah meningkatkan daya tampung pada jenjang SMP.

Sesuai dengan era otonomi daerah maka dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sragen mempunyai aturan sendiri. Aturan tersebut pada era tahun 2008 sampai dengan 2009 berbeda dengan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2010, yang tertuang di dalam petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik Provinsi maupun Kabupaten.

Semua kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2009 berbeda dengan kegiatan Penerimaan Peserta Diik Baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun 2010. Pola Penerimaan Peserta Didik

Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo pada periode tahun 2008 - 2009 diatur sebagai berikut : (1) syarat-syarat Penerimaan Peserta Didik Baru, (2) organisasi penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru, (3) sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, (4) penentuan pembobotan dan bonus Penerimaan Peserta Didik baru, (5) pelaksanaan tes Penerimaan Peserta Didik Baru, (6) bahan tes Penerimaan Peserta Didik Baru, (7) penyusunan dan pengadaan naskah tes, (8) system pengawasan, (9) pemeriksaan dan penilaian, (10) penilaian peringkat (ranking), (11) pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru, dan (12) keputusan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Adapun Pola Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2010 di SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen menggunakan Sistem ONLINE. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMP di Kabupaten Sragen secara transparan dan real time berbasis pada Teknologi Informasi. Sistem ini merupakan jaringan yang dapat diakses lewat Internet atau sms. Permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru yang menggunakan sistem online atau pola online adalah sebagai berikut : (1) karena sistem online merupakan sistem baru maka banyak calon pendaftar yang masih bingung, (2) belum semua sekolah SMP yang memiliki perangkat internet, (3) sumber daya manusia yang masih rendah, (4) siswa yang berprestasi terjaring di

sekolah-sekolah pavorit, (5) banyak sekolah yang tidak mendapatkan peserta didik baru.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam latar belakang, maka dirumuskan fokus penelitian: Bagaimana Pola Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo 2008-2010 dan tata kelola yang akuntabilitas. Berkaitan dengan fokus penelitian tersebut diuraikan menjadi beberapa sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pola Penerimaan Peserta Didik baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen tahun pelajaran 2008/2009 ?
2. Bagaimanakah Pola Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen tahun pelajaran 2009/2010 ?
3. Bagaimanakah Pola Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen tahun pelajaran 2010/2011 ?
4. Bagaimanakah Hubungan Pola Penerimaan Peserta Didik Baru dengan upaya pemerintah untuk penuntasan wajar 9 tahun ?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus, penelitian ini untuk mengimplementasikan petunjuk teknis dan surat edaran tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pola Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran 2008/2009 SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen.
2. Pola Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran 2009/2010 SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen.
3. Pola Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun pelajaran 2010/2011 SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen.
4. Mengetahui hubungan Pola Penerimaan Peserta Didik Baru dengan upaya pemerintah untuk penuntasan wajar 9 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara konseptual teoritis maupun secara praktis di lapangan.

1. Manfaat Teori
 - a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SMP yang mandiri dalam memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Pola Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo .Kabupaten Sragen.
 - b. Memberikan rangsangan terhadap penyelenggaraan SMP guna memperkuat peran sertanya dalam penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu dan memberikan informasi tentang Pola Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo Kabupaten Sragen.

- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi tenaga kependidikan dan penyelenggara program pendidikan formal, hasil penelitian diharapkan mampu memberi masukan khususnya dalam menentukan Pola Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang Pola Penerimaan Peserta Didik Baru sehingga diperoleh calon peserta didik yang bermutu.
 - c. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam rangka memilih Pola Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Daftar Istilah

1. Pola adalah sistem tersusun dari komponen konteks, *input*, proses, *output* dan *out come*. Konteks berpengaruh pada *output* dan *output* berpengaruh pada *outcome* (Depdiknas, 2006: 5)
2. Istilah Penerimaan Siswa Baru (PSB) sama dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), merupakan serangkaian kegiatan mulai dari promosi atau tahap persiapan, pendaftaran, proses seleksi, pengumuman dan daftar ulang. Dalam hal ini Penerimaan

Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen Tahun 2008-2010.

4. SSN adalah SMP yang hampir atau telah memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, manajemen pembiayaan dan penilaian pendidikan.
5. SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen telah dinyatakan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4520/C.C3/MN/2009, tertanggal 01 Oktober 2009
6. SMP Negeri 1 Sidoharjo Sragen terletak di Jalan Sragen-Sala Km.8, Purwosuman, Sidoharjo. Telp. (0271) 644324 Sragen.